



Financial Report Analysis to Measure the Financial Performance of the South Labuhanbatu Regional Government

Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan

Mutiara Aulya Almy ¹⁾; Ayu Kurnia Sari ²⁾; Vina Arnita ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹⁾ mutiaraulyaalmy4@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Financial Performance,
Financial Report Analysis, PAD.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan melalui rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pada periode 2020–2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Laporan Realisasi APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian masih sangat rendah, meskipun tahun 2024 mengalami lonjakan signifikan hingga masuk kategori tinggi. Rasio efektivitas PAD tergolong baik dengan rata-rata 95,65%, mencerminkan kemampuan daerah merealisasikan target pendapatan. Namun, rasio efisiensi menunjukkan rata-rata sebesar 376,83%, menandakan pengelolaan belanja belum optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kemandirian fiskal, peningkatan stabilitas efektivitas PAD, serta perbaikan efisiensi anggaran.

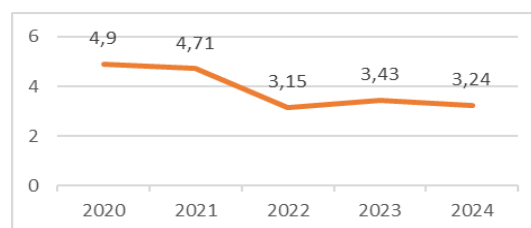
ABSTRACT

This study aims to assess the financial performance of the Labuhanbatu Selatan Regency Government using the fiscal independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio during the 2020–2024 period. A descriptive quantitative method was applied, utilizing secondary data obtained from the Local Government Budget Realization Report (APBD). The results indicate that the average fiscal independence ratio remained very low throughout the period, although a significant increase occurred in 2024, shifting the category to high independence. The effectiveness ratio of locally generated revenue (PAD) averaged 95.65%, indicating consistent achievement of revenue targets. However, the efficiency ratio reached an average of 376.83%, suggesting that expenditure management was not optimal. Overall, the findings highlight the need to strengthen fiscal independence, improve the consistency of PAD effectiveness, and enhance budget efficiency in future financial management.

PENDAHULUAN

Pernyataan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan pemerintah dan komponen-komponennya dalam laporan akuntabilitas keuangan serta menilai transparansi dan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan mengintegrasikan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan daerah. Saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kesenjangan antara potensi ekonomi asli daerah dengan target PAD yang ditetapkan dalam setiap anggaran tahunan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah, mencerminkan desentralisasi dan potensi lokal. Penurunan PAD berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran di Labuhanbatu Selatan karena keterbatasan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal. Sebaliknya, peningkatan PAD seharusnya mendukung program pengembangan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perubahan kebijakan juga berpengaruh terhadap efisiensi pengumpulan PAD, di mana pengelolaan yang kurang efektif dapat menyebabkan rendahnya realisasi PAD (Nurul Arbila & Rizal, 2022).

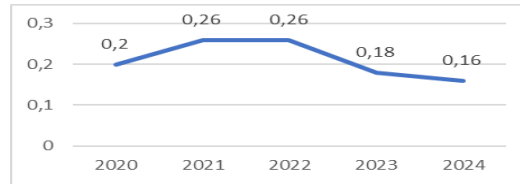
Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Labuhanbatu selatan tahun 2020-2024



Sumber: (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2025)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Gambar di atas ini menunjukkan perbandingan TPT Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2020 hingga 2024. Dimana TPT paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sedangkan TPT paling rendah terjadi pada tahun 2022.

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten



Sumber: (BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2025)

Gambar di atas menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2020 hingga 2024. Dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu Selatan paling tinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan tingkat kemiskinan paling rendah terjadi pada tahun 2024. Kemiskinan umumnya terjadi di berbagai daerah akibat kelangkaan kebutuhan dasar, kurangnya sumber daya, dan sulitnya akses pendidikan serta pekerjaan. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menghambat program-program pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan sosial, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan PAD dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Fluktuasi PAD menunjukkan tantangan dalam mencapai kestabilan ekonomi dan sosial, yang berdampak langsung pada kondisi kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Azmi, 2019).

LANDASAN TEORI

Stewardship Theory

Teori Stewardship menunjukkan bahwa pengelola publik (sebagai steward) cenderung memprioritaskan kinerja organisasi bukan semata untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan publik (Syahara et al., 2024). Dalam konteks sektor publik, teori ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanah (steward) untuk mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Pendekatan tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran sebagai upaya mencapai kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan daerah. Terlepas dari perspektif tersebut, penelitian ini menelaah sejauh mana prinsip-prinsip stewardship diterapkan dalam manajemen keuangan daerah dan bagaimana penerapannya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Laporan keuangan akuntansi sektor publik merupakan penyajian informasi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintahan guna memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja fiskal, dan perubahan dana publik selama satu periode. Proses ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta undang-undang terbaru yang mewajibkan entitas pemerintah menyusun laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), serta Laporan Perubahan Ekuitas—seluruhnya bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik (Sari, 2022). Selain untuk kebutuhan pelaporan internal dan eksternal, penyusunan laporan ini juga menjadi instrumen pengawasan dan pertanggungjawaban publik sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sepuluh tahun terakhir, perkembangan regulasi dan praktik laporan keuangan sektor publik di Indonesia menekankan pentingnya transparansi, efektivitas, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan negara dan daerah (Azzahra, 2025). Implementasi SAP berbasis akrual dan digitalisasi sistem pelaporan telah membantu pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK, sekaligus memperkuat integritas serta kepercayaan masyarakat (Pratiwi, 2024). Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, adaptasi teknologi, dan komitmen terhadap prinsip transparansi, namun sinergi kebijakan fiskal dan pengawasan dapat memperbaiki tata kelola keuangan sektor publik secara berkelanjutan (Greenation, 2025).



Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber pendapatan asli daerah dengan cara yang efektif, efisien, dan transparan. Indikator ini penting sebagai tolok ukur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, mencakup pendapatan dan belanja daerah. (Hadli & Zelika, 2020)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pelaksanaan program serta penyelenggaraan urusan pemerintahan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal (Runjung et al., 2022). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diketahui dengan cara berikut ini:

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah (Melmambessy, 2022).

Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengumpulkan pendapatan asli daerah. Pengukuran efektivitas saja belum memadai, karena meskipun target PAD dapat tercapai dengan persentase tinggi, proses pemungutannya bisa saja tidak efisien. Oleh sebab itu, diperlukan perhitungan rasio efisiensi PAD, yang dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD terhadap anggaran PAD (Ambya, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan. Proses analisis dilakukan melalui pengumpulan serta pengkajian data faktual yang relevan, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara, dengan cakupan periode pengamatan tahun 2020 hingga 2024. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan menggunakan tiga rasio utama, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi, yang menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara optimal. Adapun teknik menganalisis kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini yaitu:

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Teknik ini dilakukan dengan menghitung rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Menurut Halim (2012), rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri. Adapun rumus dari rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kategori	Rentang Nilai	Pola Hubungan	Keterangan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif	Daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat, hampir tidak ada kemandirian.
25% -50%	Rendah	Konsultatif	Daerah masih bergantung, tetapi mulai ada usaha meningkatkan PAD.
50% -75%	Sedang	Partisipatif	Daerah cukup mandiri, sudah ada kontribusi PAD yang signifikan.
75%-100%	Tinggi	Delegatif	Daerah mandiri dalam membiayai kebutuhan, ketergantungan pada pusat sangat kecil.

Sumber: Halim (2012)

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD dengan target yang ditetapkan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa rasio mencapai di atas 100% menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam tata kelola penerimaan daerah. Menurut Halim (2018), rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam anggaran. Adapun rumus dari rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}}$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas

Kategori	Rentang Nilai	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif	Realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan.
90% – 100%	Efektif	Realisasi PAD mencapai target yang ditetapkan.
80% – 90%	Cukup Efektif	Realisasi PAD mendekati target, meskipun belum sepenuhnya tercapai.
60% – 80%	Kurang Efektif	Realisasi PAD cukup jauh dari target yang ditetapkan.
< 60%	Tidak Efektif	Realisasi PAD sangat rendah dibandingkan target, menunjukkan kinerja buruk.

Sumber: Halim (2018)

Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan target PAD secara optimal. Nilai rasio yang berada di atas 90 persen mengindikasikan kinerja yang efektif, sedangkan capaian di bawah 80 persen menandakan adanya keterbatasan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, rasio efektivitas berperan sebagai ukuran penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah intensifikasi—optimalisasi penerimaan dari sumber yang sudah ada—dan ekstensifikasi—pengembangan sumber pendapatan baru—untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Analisis Rasio Efisiensi PAD

Kusufi (2014) menyebut rasio efisiensi yang rendah menandakan pengelolaan PAD yang semakin optimal dan hemat sumber daya. Menurut Halim (2018), rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya agar belanja yang dikeluarkan tidak melebihi pendapatan yang diterima. Adapun rumus dari rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efisiensi

Kategori	Rentang Nilai	Keterangan
< 60%	Sangat Efisien	Belanja jauh lebih kecil dari pendapatan, menunjukkan pengelolaan yang sangat baik.
60% – 80%	Efisien	Belanja masih proporsional terhadap pendapatan, menunjukkan efisiensi yang baik.
80% – 90%	Cukup Efisien	Belanja mulai meningkat, tetapi masih dalam batas cukup terkendali.
90% – 100%	Kurang Efisien	Belanja hampir sama dengan pendapatan, ruang fiskal menjadi sempit.
> 100%	Tidak Efisien	Belanja lebih besar dari pada pendapatan, terjadi pemborosan.

Sumber: Halim (2018)

Semakin kecil nilai rasio efisiensi, semakin menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan serta mengendalikan belanja secara optimal. Capaian tersebut mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat.



Sebaliknya, rasio yang mendekati atau bahkan melampaui 100 persen mengindikasikan kondisi tidak efisien, di mana pengeluaran daerah hampir setara atau melebihi pendapatan yang tersedia. Situasi ini dapat mencerminkan tingginya ketergantungan pada dana transfer maupun sumber pembiayaan lainnya, serta menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Table 4. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Rentang Nilai	Pola Hubungan
2020	80.848.593.000	861.754.899.000	9,38%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	70.244.120.389	920.601.159.578	7,63%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	61.652.362.901	904.878.777.549	6,81%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	69.612.910.536	987.326.560.558	7,05%	Rendah Sekali	Instruktif
2024	968.138.360.138	976.025.987.138	99,19%	Tinggi	Delegatif
Rata – Rata Rasio Kemandirian Tahun 2020-2024					25,43%

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025 (diolah)

Rasio Efektivitas PAD

Table 5. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Pola Hubungan
2020	55.858.593.000	62.065.103.333	90,05%	Efektif
2021	915.831.067.389	920.601.159.578	99,48%	Efektif
2022	919.308.204.299	904.878.777.549	101,59%	Sangat Efektif
2023	932.103.999.344	987.326.560.558	94,41%	Efektif
2024	904.883.941.228	976.025.987.138	92,71%	Efektif
Rata – Rata Rasio Efektivitas Tahun 2020-2024				95,65%

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren efektivitas yang konsisten baik. Pada tahun 2022, rasio efektivitas sebesar 101,59% mengindikasikan bahwa realisasi PAD lebih tinggi dari target, sehingga masuk kategori "Sangat Efektif". Sementara pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024, rasio efektivitas berada pada rentang 90,05% hingga 99,48%, yang menandakan kinerja masih pada tingkat "Efektif". Rata-rata rasio efektivitas selama lima tahun tercatat sebesar 95,65%, sehingga kinerja PAD secara umum tergolong baik dan menunjukkan bahwa Labuhanbatu mampu merealisasikan target PAD sepanjang periode pengamatan, meski pencapaian tertinggi terjadi di tahun 2022 dan beberapa tahun lainnya tetap efektif.

Rasio Efisiensi PAD

Table 6. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024

Tahun	Realisasi Daerah Belanja	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi	Rentang Penilaian
2020	832.890.000.000	55.858.593.000	1.491,41%	Tidak Efisien
2021	823.746.713.836	915.831.067.389	89,96%	Cukup Efisien
2022	813.644.229.558	919.308.204.299	88,53%	Cukup Efisien
2023	1.007.222.514.584	932.103.999.344	108,07%	Tidak Efisien
2024	960.994.412.471	904.883.941.228	106,20%	Tidak Efisien
Rata – Rata Rasio Efektivitas Tahun 2020-2024				376,83%

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa nilai rasio efisiensi PAD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio

efisiensi mencapai 1.491,41%, yang mengindikasikan kondisi tidak efisien. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai rasio turun cukup signifikan menjadi masing-masing 89,96% dan 88,53%, sehingga kedua tahun tersebut berada dalam kategori cukup efisien. Namun, pada tahun 2023 rasio kembali meningkat ke 108,07% dan pada 2024 naik lagi menjadi 106,20%, dimana kedua tahun tersebut kembali masuk pada rentang tidak efisien.

Secara prinsip, semakin rendah rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD untuk membiayai belanja daerah. Namun, pada beberapa tahun dalam periode pengamatan, realisasi belanja daerah masih cenderung lebih besar dibandingkan realisasi PAD, sehingga menghasilkan rasio efisiensi yang tinggi dan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya optimal.

Rata-rata rasio efisiensi PAD selama lima tahun tercatat sebesar 376,83%, yang menguatkan kesimpulan bahwa daerah masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat efisiensi yang ideal sesuai standar penilaian. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terarah untuk mengendalikan belanja serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar efisiensi keuangan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah pada periode 2020–2023, dengan nilai antara 6,48%–7,63% dan masuk kategori rendah sekali. Lonjakan signifikan pada tahun 2024, ketika kemandirian meningkat menjadi 99,19%, memperlihatkan adanya perubahan struktural dalam perolehan PAD. Fenomena peningkatan tajam ini konsisten dengan pandangan Syahara et al. (2024) bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah serta optimalisasi aset dapat secara substansial meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

Secara rata-rata, rasio kemandirian lima tahun berada di level 25,43%. Hasil ini mendukung argumen Sudarlan (2022) bahwa kemandirian fiskal perlu dibangun melalui strategi jangka panjang dan tidak dapat dicapai secara instan.

Dari sisi efektivitas yang berada pada kisaran 90,05%–101,59% menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan secara umum mampu merealisasikan target PAD dengan baik. Nilai ini masuk kategori efektif hingga sangat efektif. Temuan tersebut sejalan dengan Novandalina et.,al (2020) hasil penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 99,59%. Efektivitas ini didorong oleh perencanaan pendapatan yang realistis, mekanisme pemungutan yang konsisten, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap potensi pendapatan. Angka efektivitas yang mendekati 100% ini mengindikasikan bahwa pengelolaan PAD telah berjalan optimal. Sementara itu, Rasio efisiensi memperlihatkan dinamika yang kontras. Tahun 2020 masuk kategori tidak efisien dengan nilai 1.491,41%.

Kondisi membaik pada 2021 dan 2022 dengan nilai 89,96% dan 88,53% (cukup efisien), namun kembali memburuk pada 2023–2024 ketika rasio naik menjadi 108,07% dan 106,20%. Pola ini konsisten dengan hasil penelitian Syukri (2025) yang menegaskan bahwa belanja daerah di banyak kabupaten/kota cenderung meningkat lebih cepat dibandingkan kapasitas PAD, sehingga menurunkan efisiensi fiskal daerah. Rata-rata 376,83% menunjukkan adanya ketidakseimbangan signifikan antara belanja dan pendapatan.

Ketiga penelitian tersebut secara konsisten menemukan bahwa kemandirian fiskal pemerintah daerah masih rendah hingga sedang, dengan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer pusat. Efektivitas penerimaan PAD umumnya cukup baik hingga efektif, menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target anggaran sebagian besar tahun. Namun, tingkat efisiensi pengelolaan anggaran masih menjadi tantangan utama karena biaya pemungutan dan belanja yang sering melebihi kemampuan pendapatan daerah.

Temuan ini menegaskan perlunya strategi peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD, dan pengendalian belanja daerah agar efisiensi keuangan dapat ditingkatkan demi keberlanjutan fiskal dan pembangunan daerah. Dalam konteks teori stewardship, pemerintah daerah dipandang sebagai steward yang memegang amanah publik untuk mengelola keuangan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari temuan penelitian ini, terlihat bahwa masih terdapat ruang besar untuk memperkuat peran stewardship dalam pengelolaan keuangan daerah Labuhanbatu Selatan. Rendahnya rasio kemandirian pada sebagian besar periode menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kemampuan internal dalam menghasilkan pendapatan mandiri. Efektivitas PAD yang relatif baik menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi target pendapatan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada empat tahun pertama, tingkat kemandirian fiskal berada pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, yang menandakan ketergantungan yang sangat kuat pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan capaian 99,19% membawa daerah ini masuk kategori tinggi dan pola hubungan delegatif. Meski demikian, rata-rata kemandirian lima tahun yang hanya mencapai 25,43% mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar tidak terjebak dalam ketergantungan struktural terhadap pendanaan eksternal.

Dari sisi efektivitas penerimaan PAD, kinerja Labuhanbatu Selatan tergolong baik. Selama periode pengamatan, rasio efektivitas berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, kecuali tahun tertentu yang menunjukkan variasi kecil. Dengan rata-rata 95,65%, realisasi PAD dapat dikatakan konsisten memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan perencanaan pendapatan telah berjalan cukup baik, meski ke depan tetap dibutuhkan inovasi dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan baru agar stabilitas pendapatan dapat terus terjaga.

Berbeda halnya dengan efisiensi, pengelolaan PAD masih menghadapi tantangan besar. Nilai rasio efisiensi berfluktuasi tajam, bahkan pada beberapa tahun mencapai lebih dari 100%, yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang tersedia. Dengan rata-rata 376,83%, kondisi ini menandakan bahwa pemanfaatan anggaran belum berjalan optimal dan prinsip value for money belum sepenuhnya terwujud.

Saran

Sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menemukan rendahnya kemandirian fiskal, efektivitas PAD yang cukup baik, serta efisiensi yang masih menjadi persoalan utama di banyak daerah, hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa Labuhanbatu Selatan perlu memperbaiki struktur keuangannya secara lebih strategis. Optimalisasi pendapatan, pengendalian belanja, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja fiskal secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder dari laporan realisasi APBD selama lima tahun, sehingga sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data pemerintah daerah. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada tiga rasio utama—kemandirian, efektivitas, dan efisiensi—tanpa melibatkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, atau faktor struktural yang mungkin turut memengaruhi kinerja keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan juga bersifat kuantitatif deskriptif tanpa mengombinasikan metode kualitatif yang dapat menggali faktor penyebab secara lebih mendalam.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disarankan untuk lebih intensif mengoptimalkan potensi PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan, modernisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi perencanaan dan pengawasan belanja perlu diperkuat agar efisiensi dapat ditingkatkan dan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan variabel tambahan serta menggunakan data primer melalui wawancara, observasi, atau pendekatan campuran untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, S.E., M.Si. (2023). Buku Ajar Ekonomi Keuangan Daerah (hlm. 115-116). Bandarlampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/51451/1/BUKU%20EKONOMI%20KEUANGAN%20DAERAH-1.pdf>
- Azmi, N. (2019). Kemiskinan dan Kinerja Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 112–124.
- Azzahra, S. (2025). Perkembangan Regulasi Laporan Keuangan Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 33–47.
- BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (2025). Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik. <https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/id>

- Penghijauan. (2025). Digitalisasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 6(1), 22–36.
- Hadli, M., & Zelika, F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 77–89.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kusufi, M. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Kencana.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Melmambessy, V. (2022). Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 55–66.
- Novandalina, A., & Ernawati, F.Y. (2020). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, 12(3), 45–57. <https://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/457>
- Nurul Arbila, N., & Rizal, S. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak Daerah terhadap Optimalisasi PAD. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 44–53.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021). Laporan Kemajuan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Diakses pada 22 November 2025, dari <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail3-2021-ejFDT0NYK1JaSm5HckpQV0JjNytuQT09>
- Pratiwi, R. (2024). Faktor Penentu Opini WTP pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(1), 20–34.
- Runjung, L., Setiawan, D., & Rohani, F. (2022). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Otonomi Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 13–25.
- Sari, L. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(3), 201–215.
- Syahara, R., Putra, F., & Aminah, S. (2024). Penerapan Stewardship Theory dalam Tata Kelola Keuangan Daerah. *Jurnal Tata Kelola*, 12(1), 1–14.
- Syukri, U. (2025). Efisiensi fiskal dan dampaknya terhadap transfer dana daerah: Analisis kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025. *Journal of Governance Innovation (JOGIV)*, 15(2), 101–120. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/JOGIV/article/view/6832>